

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga komoditas penting pada Triwulan II (April-Juni) menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan pasokan. Pada awal triwulan, harga cenderung menurun seiring berkurangnya permintaan masyarakat setelah HBKN Idulfitri. Selanjutnya, memasuki akhir triwulan, harga beberapa komoditas kembali meningkat akibat terbatasnya pasokan dan stok. Uraian lebih lanjut mengenai perkembangan harga masing-masing komoditas disajikan pada pembahasan berikut :

1. Pada bulan April, sebagian besar komoditas pangan strategis mengalami penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh menurunnya permintaan masyarakat setelah HBKN Idulfitri. Penurunan harga terjadi pada cabai rawit dari Rp110.000/Kg menjadi Rp48.000/Kg, cabai merah keriting dari Rp50.000/Kg menjadi Rp40.000/Kg, bawang merah dari Rp60.000/Kg menjadi Rp48.000/Kg, telur ayam ras dari Rp40.000/Kg menjadi Rp39.000/Kg, kentang dari Rp18.000/Kg menjadi Rp16.000/Kg, serta jeruk lokal dari Rp20.000/Kg menjadi Rp18.000/Kg. Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Harga tomat meningkat dari Rp18.000/Kg menjadi Rp26.000/Kg, sedangkan minyak goreng curah naik dari Rp20.000/Kg menjadi Rp21.000/Kg. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan di pasar, sementara komoditas lainnya masih berada pada kondisi harga yang relatif stabil.

2. Pada bulan Mei, perkembangan harga komoditas pangan menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan pada beberapa komoditas. Kenaikan harga terjadi pada cabai rawit yang meningkat dari Rp48.000/Kg menjadi Rp66.000/Kg, bawang merah dari Rp48.000/Kg menjadi Rp52.000/Kg, daging ayam ras dari Rp38.000/Kg menjadi Rp40.000/Kg, serta jeruk lokal dari Rp18.000/Kg menjadi Rp20.000/Kg. Peningkatan harga tersebut dipengaruhi oleh mulai berkurangnya pasokan di pasar seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami penurunan harga. Bawang putih turun dari Rp45.000/Kg menjadi Rp40.000/Kg, sedangkan telur ayam ras turun dari Rp36.000/Kg menjadi Rp34.000/Kg. Penurunan harga tersebut didukung oleh pasokan yang memadai sehingga mampu menjaga ketersediaan komoditas di pasar dan menekan harga pada tingkat konsumen

3. Pada bulan Juni, perkembangan harga komoditas pangan didominasi oleh kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis yang dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan di pasar. Kenaikan harga terjadi pada cabai merah keriting dari Rp51.000/Kg menjadi Rp80.000/Kg, cabai rawit dari Rp66.000/Kg menjadi Rp110.000/Kg, bawang merah dari Rp52.000/Kg menjadi Rp80.000/Kg, bawang putih dari Rp40.000/Kg menjadi Rp46.000/Kg, serta tomat dari Rp18.000/Kg menjadi Rp24.000/Kg. Kenaikan harga tersebut mencerminkan mulai berkurangnya ketersediaan stok sehingga memberikan tekanan terhadap harga di tingkat konsumen. Sementara itu, penurunan harga hanya terjadi pada komoditas kacang tanah, yaitu dari Rp43.000/Kg menjadi Rp41.000/Kg. Penurunan ini didukung oleh pasokan yang relatif mencukupi sehingga harga di pasar cenderung lebih stabil dibandingkan komoditas lainnya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang dihadapi oleh TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pengendalian Inflasi pada Periode Triwulan I tahun 2026, antara lain :

1. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program pengendalian inflasi.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat berdampak pada terbatasnya ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi, seperti operasi pasar, subsidi distribusi, maupun intervensi harga. Kondisi ini menyebabkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons gejolak harga menjadi lebih terbatas dibandingkan daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih besar atau sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih kuat.
2. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan komoditas pangan dari luar daerah.
Sebagian besar kebutuhan pangan strategis di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih dipenuhi melalui pasokan dari kabupaten/kota lain maupun luar Provinsi Sulawesi Utara. Ketergantungan ini menyebabkan harga komoditas di daerah lebih rentan terhadap gangguan distribusi, kenaikan biaya transportasi, maupun perubahan harga di daerah pemasok. Berbeda dengan daerah yang memiliki produksi pangan lokal yang memadai, kemampuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga masih sangat dipengaruhi oleh kondisi di wilayah pemasok.
3. Produksi pertanian yang belum merata dan dipengaruhi faktor musim.
Produksi komoditas hortikultura di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum berlangsung secara merata sepanjang tahun karena pola tanam yang belum seragam serta pengaruh kondisi iklim. Memasuki musim kemarau, beberapa sentra produksi mengalami penurunan hasil panen sehingga pasokan komoditas di pasar menjadi berkurang dan mendorong kenaikan harga. Dibandingkan dengan daerah yang telah menerapkan pola tanam bergilir dan memiliki sistem irigasi yang lebih baik, kondisi tersebut menjadikan pasokan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur relatif lebih mudah berfluktuasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan Pengendalian Inflasi daerah telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur antara lain:

1. Pada Bulan Juni Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional merealisasikan bantuan pangan kepada 7.573 Penerima manfaat di seluruh Kecamatan yang ada. Bantuan berupa 20 Kg beras dan 4 Liter minyak goreng kepada tiap penerima manfaat.
2. Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara rutin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok bahan pangan pokok, mengidentifikasi potensi kendala distribusi, serta memastikan tidak terjadi praktik yang dapat memicu gejolak harga. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan agar pasokan tetap terjaga dan harga komoditas pangan tetap stabil. Sidak Pasar dilakukan di Pasar Kotabunan, Pasar Modayag dan Pasar Tutuyan. Selain

itu juga TPID bekerjasama dengan Satgas Pengendalian LPG rutin melaksanakan sidak ke Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg dan memberikan himbauan kepada masyarakat lewat Surat Edaran yang dikeluarkan untuk tidak mengecer di warung atau kios LPG 3 Kg agar harga tetap stabil.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemberian bantuan pangan kepada 7.573 penerima manfaat merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya untuk menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah di tengah fluktuasi harga pangan. Program ini dinilai memberikan dampak positif dengan membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok penerima manfaat, sehingga mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga. Selain itu, penyaluran bantuan pangan turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas konsumsi masyarakat dan menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak kenaikan harga komoditas pangan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.

2. Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar terhadap komoditas pangan serta distribusi LPG 3 Kg di tingkat agen dan pangkalan merupakan salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan kepatuhan terhadap ketentuan distribusi. Hasil pelaksanaan sidak menunjukkan bahwa harga LPG 3 Kg di tingkat konsumen masih relatif tinggi, yang antara lain dipengaruhi oleh praktik penjualan kembali oleh pangkalan kepada warung pengecer. Kondisi tersebut menyebabkan LPG 3 Kg diperdagangkan di luar rantai distribusi yang telah ditetapkan, sehingga harga jual kepada masyarakat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif serta koordinasi dengan agen, pangkalan, dan instansi terkait agar penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi dapat lebih tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan mampu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan program bantuan pangan perlu terus dilanjutkan sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi, dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pemutakhiran data secara berkala. Penyaluran bantuan diharapkan diprioritaskan pada periode ketika terjadi peningkatan harga komoditas pangan atau menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sehingga manfaatnya lebih optimal dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait untuk memastikan proses penyaluran berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program juga perlu dilakukan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan serta untuk memastikan bantuan pangan memberikan dampak yang optimal terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar dan pengawasan distribusi LPG 3 Kg perlu dilakukan secara lebih rutin dan terjadwal, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta pada periode yang berpotensi terjadi gejolak harga. Pengawasan hendaknya diperkuat melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Pertamina,

agen, dan pangkalan LPG, untuk memastikan penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan tidak disalurkan kepada pengecer yang menyebabkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, perlu dilakukan pembinaan kepada agen dan pangkalan mengenai kepatuhan terhadap tata niaga LPG bersubsidi, disertai penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran. Untuk komoditas pangan, hasil sidak diharapkan menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi, seperti pelaksanaan operasi pasar atau koordinasi pemenuhan pasokan, sehingga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat tetap terjaga.

3. Untuk mengendalikan harga bahan pokok maka kedepan akan dilaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan bekerjasama dengan Perum Bulog.